

RENCANA AKSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah dan Infrastruktur Ketenagalistrikan serta Menurunkan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	17.620	35.241	52.862	70.482,62	Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara Provinsi	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	-	-	-	82,46	Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	1	1	4	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	1	1	4
													Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	-	2	10	Tertaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	-	2	10
													Tertatanya Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	1	3	2	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	1	3	2
													Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	-	-	-	1	Tertaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	-	-	-	1
							Meningkatnya cakupan dan aksesibilitas layanan pengujian bahan tambang	Persentase pengujian bahan tambang yang dilayani	-	-	-	100%	Tertayaninya Pengujian Bahan Tambang	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	1	Tertaksananya pengumpulan dan pengolahan data pengujian bahan tambang	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	1
													Jumlah Surat Keterangan Laporan Hasil Uji	Jumlah Surat Keterangan Laporan Hasil Uji	-	-	-	5		Jumlah Surat Keterangan Laporan Hasil Uji	-	-	-	5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
							Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah I	-	-	-	18%	Ditetapkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-	-	-	2	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-	-	-	2
							Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah II	-	-	-	24%	Ditetapkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-	1	-	1	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-	1	-	1
													Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	8	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	8
							Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah III	-	-	-	2,38%	Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	8	-	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	8	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
							Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	-	-	-	14,28%	Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	2	-	-	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	2	-	-
							Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Persentase Usaha Pertambangan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam wilayah Cabang Dinas ESDM Wilayah V	-	-	-	5%	Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	4	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	4
							Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persentase Capaian Tata Kelola Air Tanah Berkelanjutan	-	-	-	30%	Terpetakannya Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	-	-	-	1	Tertaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	-	-	-	1
													Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4	-	4	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4	-	4
													Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	1	4	-	Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	1	4	-
							Meningkatnya Cakupan dan Akseibilitas Layanan Pengujian Geologi dan Sampel Air Tanah	Persentase Pengujian Geologi dan Sampel Air Tanah yang dilayani	-	-	-	100%	Tertayaninya Pengujian Geologi dan Sampel Air Tanah	Jumlah Surat Keterangan Hasil Uji	-	-	-	5	Terkumpulnya dan terolahnya data pengujian geologi dan sample air tanah	Jumlah Surat Keterangan Hasil Uji	-	-	-	5
													Jumlah Perjanjian Kerja sama (PKS)	Jumlah Perjanjian Kerja sama (PKS)	-	-	-	1		Jumlah Perjanjian Kerja sama (PKS)	-	-	-	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
							Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Persentase pengendalian pemanfaatan air tanah yang sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II	-	-	-	11,26%	Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	-	-	1	1	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II	-	-	1	1
													Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	-	2	-	-	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III	-	2	-	-
													Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	-	1	-	-	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	-	1	-	-
													Tertaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	-	-	2	2		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	-	-	2	2
		Konsumsi Listrik per Kapita	173	347	520	694,53	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan	-	-	-	60	Tertatanya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	1	-	-	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	-	1	-	-
													Tertatanya Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	-	3	-	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	-	3	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
													Tertaksananya Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	1	-	-	Tertaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	-	1	-	-
													Tertatanya Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	2	2	-	Tertaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	2	2	-
							Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I	-	-	-	40%	Tertatanya Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	2	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	2
							Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV	-	-	-	2,6%	Tertatanya Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	1	1	-	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	1	1	-
							Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang memenuhi aspek keselamatan Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V	-	-	-	4,5%	Tertatanya Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	4	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	-	4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat secara merata, aman, andal dan ramah lingkungan	Rasio Elektrifikasi	N/A	N/A	N/A	99,8	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	N/A	N/A	N/A	99,8	Teranggarkannya bantuan sarana instalasi rumah tangga tidak mampu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	1	3	-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	1	3	-
													Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	541	272	204	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	541	272	204	
							Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Tingkat ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan elektrifikasi di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	N/A	N/A	N/A	99%	Teranggarkannya bantuan sarana instalasi rumah tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	2	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	2
													Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	4	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-	4	
							Meningkatnya Kematagan SPBE Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	1
							Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	1	-	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	1	-	
													Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	2	
													Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1	-	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1	-	
												Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	150	150	150	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	150	150	150	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
														Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-	-
														Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	4	5	7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	4	5	7
													Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5	-	-	Tertaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5	-	-
														Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1	-	-	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1	-	-
													Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4	Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4
														Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2	-	-	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	2	-	-
													Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	-	1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	-	1
													Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
														Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1
													Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	3	3	16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	3	3	16
							Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum di UPT Laboratorium	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3	-	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
													Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang di UPT Laboratorium	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
													Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah pada UPT pelayanan teknis laboratorium	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	3	-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	3	-
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Tertindakannya Administrasi Umum di Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1	1	-
														Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	-	-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1	-	-
													Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
													Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3	-	-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3	-	-
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	3	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	3
													Tertindakannya Administrasi Umum di Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2	1	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2	1	-
													Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang di Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
													Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1	1	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1	1	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum di Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3	-	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3	-	-
													Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1
													Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang di Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
														Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1
													Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	3	-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	3	-
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pelaporan di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	2
													Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5	-	-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5	-	-
													Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	1	-	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	1	-
													Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan jasa penunjang di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
														Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1
													Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV			I	II	III	IV
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	66	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan di Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1	1	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1	1
													Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1	1	3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	3
													Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum di Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1	2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1	2
													Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang di Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1
													Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	-	-	1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1
													Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1	-	2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1	-	2
3	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan efisiensi energi	Intensitas Energi Primer	N/A	N/A	N/A	282,85	Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	-	-	-	14	Terbangunnya infrastruktur energi baru terbarukan	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	1	-	-	Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	1	-	-
													Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT		-	-	751	-	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	-	-	751	-

Palu, 06 Mei 2026
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ARFAN, M.Si.
NIP. 19710909 199012 1 001